

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR**                      **TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**TAHUN 2025**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**PEMERINTAH PESISIR SELATAN**  
**Dibuat pada tanggal,    MARET 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) pada kondisi biasa merupakan penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan namun pengecualian pada tahun ini yang merupakan awal tahun masa jabatan (2021-2026) kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2025. Renja BPBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra BPBD 2021-2026 yang akan disusun setelah RPJMD (2021-2026) ditetapkan.

Rencana kerja BPBD Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD sesuai visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan target pada RKPD Tahun 2025, dan prioritas program pembangunan daerah .

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menyusun dokumen ini. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025, untuk menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan kebencanaan di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Painan, Maret 2025

KEPALA PELAKSANA,

**YUSKARDI, SST, MT**

NIP.19700126.199903.1.004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tanggung jawab Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk tim penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan penyusunan RKA- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
3. Substansi rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Renstra, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana

- Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan atas pertimbangan urusan pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
  5. Program/kegiatan dalam RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya;
  6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ ;
  7. Dibentuknya forum OPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk pembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusi dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang OPD masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum OPD harus yang betul-betul memiliki komitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya;
  8. Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan;
  9. Program dan kegiatan di dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diusulkan untuk didanai melalui APBD Provinsi dan APBN, dan/atau usulan program/kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK. Tembusannya disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pertanian;
  10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pengkajian terhadap usulan program/ kegiatan yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya dibahas bersama OPD-OPD kabupaten/kota tersebut dalam forum OPD Provinsi untuk menentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan/atau APBN.

Mengingat pentingnya peranan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD dengan maksud dan tujuan untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan diharapkan dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan.

Kegiatan penyusunan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadi APBD (awal Desember). Proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

A). Langkah-langkah pada Kegiatan Persiapan mencakup:

1. Melakukan identifikasi para pemangku kepentingan

Identifikasi dan seleksi para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai peserta forum OPD, dan/atau yang akan dipilih sebagai anggota Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup individu ataupun lembaga yang dinilai kompeten, relevan, dan representatif. Jika kegiatan ini telah dilakukan pada waktu penyusunan Renja tahun sebelumnya, maka pada langkah ini cukup mereview dan melakukan perubahan yang diperlukan berdasarkan masukan tahun sebelumnya.

2. Pembentukan Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pada langkah ini selain membentuk Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disarankan pula untuk menetapkan fasilitator untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan partisipatif yang efektif dan efisien. Tim yang dibentuk usahakan melibatkan anggota dari unsur LSM yang memiliki kompetensi dan komitmen. Tim penyusun Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan dapat juga sekaligus dirangkap/merangkap Tim

penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Jika tim telah terbentuk pada tahun sebelumnya, maka jika diperlukan dapat direview kembali.

3. **Penyiapan Kelembagaan Forum OPD**

Pada langkah ini dilakukan penyiapan kelembagaan forum OPD yang pesertanya merupakan perwakilan para pemangku kepentingan yang memiliki relevansi dan kompetensi khusus serta punya komitmen dengan OPD yang bersangkutan. Jika kelembagaan forum OPD ini sudah terbentuk, maka tinggal dilanjutkan.

4. **Pengisian Formulir (Isian)**

Pada langkah ini Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konfirmasi terhadap formulir isian/matrik yang disampaikan oleh Kepala Daerah tentang usulan program dan kegiatan yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju serta menyerahkan formulir isian yang telah dilengkapi dan telah direview kepada Bappedalitbang.

5. **Penyusunan Rencana Kerja Tim untuk Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun rencana kerja untuk penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta menyiapkan outline atau daftar isi Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan lampiran berupa format kegiatan yang akan dianggarkan. Format kegiatan yang akan dianggarkan tersebut menggunakan format sesuai ketentuan yang diatur dalam **PERMENDAGRI Nomor 86/2017**.

6. **Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Kementrian/Lembaga (K/L) Terkait**

Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan meminta/ mengumpulkan informasi atau berkonsultasi dengan K/L sehubungan dengan rancangan Renja K/L untuk bidang/sector terkait diprovinsi dan kabupaten/kota.

7. **Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Provinsi Terkait**

Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan meminta/ mengumpulkan informasi atau berkonsultasi sehubungan dengan

rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk bidang/sektor terkait.

**B). Analisis dan Pengkajian Dokumen**

Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang terkait langsung dengan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD diterima. Pada kegiatan analisis dan pengkajian dokumen ini mencakup:

1. **Melakukan kajian terhadap Rancangan Awal RKP Nasional (dan RKPD Provinsi)**  
Langkah ini dimaksudkan untuk melihat arahan dan prioritas program/kegiatan yang terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. **Review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi**  
Melakukan identifikasi arahan dan prioritas RPJM Nasional untuk diakomodasikan dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga perlu mengidentifikasi arahan dan prioritas RPJM Provinsi atau dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun yang direncanakan (jika telah disusun), untuk diakomodasikan dan disinergikan dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Jika belum diperoleh informasi untuk tahun yang direncanakan, maka dapat diidentifikasi dari RKP/RKPD Provinsi tahun lalu.
3. **Kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra OPD**  
Melakukan evaluasi status capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan terhadap RPJM Daerah dan program dan kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun rencana, sesuai tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan tahun rencana
4. **Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**  
Melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan tahun berjalan, evaluasi pencapaian SPM serta review terhadap kebutuhan program dan

kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju pada program/ kegiatan (n + 1)

5. Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bapedalitbang

C). Kegiatan Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan ini dilaksanakan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bapedalitbang. Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun laludan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan RPJMD pada tahun bersangkutan;
2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan pilihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun RPJMD;
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut;
4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas OPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan;
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD;

7. Menyiapkan Forum OPD atau Forum Gabungan OPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap OPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD;
8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirinci menurut kecamatan, dan nagari serta perkiraan alokasi sumber pendanaan dari APBD kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
10. Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari RPJM Provinsi dan/atau dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya; dan
11. Tembusan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disampaikan kepada OPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN

(dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 .Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanguulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pertanian yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam rencana operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang;
  - 1.2. Landasan Hukum;
  - 1.3. Maksud dan tujuan; dan
  - 1.4. Sistematika penulisan.
- 

### **1.1 SISTEMATIKA PENYAJIAN RENCANA KERJA BPBD**

Sistematika penulisan berupa narasi terdiri dari 5 (lima) bagian atau bab. Masing-masing bagian dapat dilengkapi dengan tabel dan gambar. Tujuan penyampaian tabel dan gambar agar sistematis dan mudah dipahami. Susunannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Uraian berkaitan latar belakang perlunya penyusunan dokumen Renja PD, dasar hukum yang melandasi penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPd.

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

Menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025, berkaitan dengan target dan realisasi, kendala dan pendorong ketercapaian dan tidak ketercapaian target sesuai dengan indikator kinerja yang digunakan. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga disampaikan di sini dalam menunjang keberhasilan pembangunan di daerah. Sehingga Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat terpetakan dengan jelas, sehingga mempermudah tindakan apa yang akan di laksanakan. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 akan memperhatikan visi, misi, strategi dan kebijakan prioritas pembangunan sesuai dengan Rancangan Awal RKPd dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang bersumber usulan Masyarakat, Pemerintahan Kecamatan/Nagari dan pokok-pokok pikiran wakil rakyat.

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Uraian berkaitan dengan harmonisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional. Sehingga kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjang pencapaian visi-misi Bupati, program kegiatan provinsi dan nasional. Tujuan dan sasaran mana yang menjadi tugas perangkat daerah, merupakan bagian dari tujuan dan saran dalam visi misi Bupati,

selanjutnya akan di rinci secara nyata dalam program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator pengukuran, target kinerja yang jelas.

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Setelah mencermati RKPD 2025 dan Rancangan RPJMD 2021-2026, maka akan tersusunlah daftar program/kegiatan/subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

#### **BAB V. PENUTUP**

Narasi berisi kesimpulan umum renja dan gambaran umum kaitannya dengan proses, dan harapan akan dokumen yang disusun.

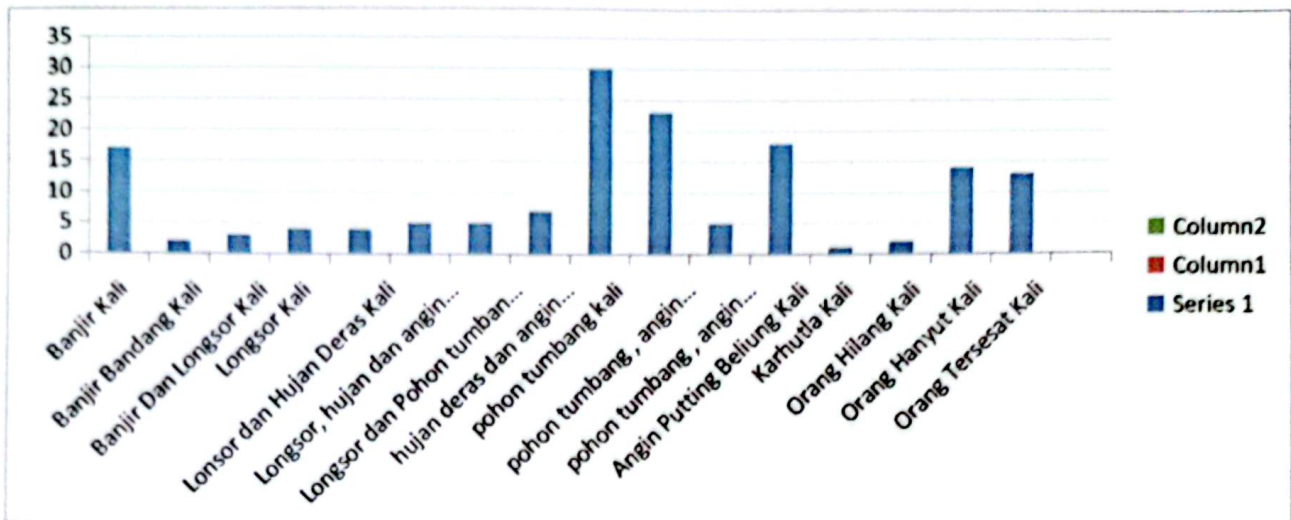
## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBD TAHUN 2025**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD 2021-2026 Serta Capaian RENSTRA BPBD.**

Analisa terhadap Realisasi Belanja Daerah selama tahun 2021-2026 dapat kita jelaskan bahwa Renja dan Realisasi Anggaran BPBD terjadi perbedaan antara usulan Renja dan Realisasi Kegiatan,Finalisasi Tahun 2025 Rp.6.457.456.260,-(Terbilang Enam Miliyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah ). Finalisasi Perubahan Tahun 2025 Rp. 6.351.028.010,- (Terbilang Enam Miliyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Sepuluh Rupiah ) . Finalisasi Tahun 2024 Rp. 7.996.874.012,- (Terbilang Tujuh Miliyar Sembilan Ratus Sembilan puluh enam juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Dua Rupiah) Finalisasi Tahun 2023 Rp.5.784.482.170,- (Terbilang Sebesar Ilma Miliyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah ). Finalisasi Realisasi Tahun 2022 Rp.11.925.744.896,- (Terbilang Sebelas Miliyar Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).Renja Tahun 2022 Sebesar Rp.12.432.062.771,- (Terbilang Dua Belas Miliyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Puluh Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). Renja 2021 sebesar Rp.29.544.270.888.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD



Pesisir Selatan Merupakan Kawasan Rawan Bencana Daerah yang diindikasikan sering terjadi bencana alam. Di kawasan rawan longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan bencana kebakaran hutan, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan abrasi pantai. bencana-bencana yang terjadi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan hilangnya nyawa manusia. Sedemikian lengkapnya Jenis-Jenis bencana yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Maka diperlukan antisipasi terhadap segala jenis bencana berupa upaya penedeksian dini banjir peringatan dini tsunami, pelestarian wilayah-wilayah rawan longsor dan gerakan tanah, pencegahan kebakaran hutan serta pencegahan abrasi pantai dan gelombang pasang.

Banjir adalah suatu kondisi dimana tidak tertampunya air dalam saluran pembuangan (Palung Sungai) atau terhambatnya aliran air di dalam salurab pembuangan, sehingga meluap mennggenangi daerah (dataran banjir) sekitarnya (Suripin, 2003, Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan). Banyak Penyebab suatu daerah mengalami banjir, diantaranya disebabkan oleh penggundulan hutan di daerah hulu/tangkapan air, dan kondisi Topografi Wilayah. 52,91% dari luas wliayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari kelerengan >40%. Kelerengan wilayah yang besar, alur sungai dari hulu ke hilir yang relative pendel dan kerusakan tangkapan air di daerah hulu adalah pembentuk sempurna dari kerentanan banjir di sebagian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

## *Rencana Kinerja (RENJA) BPBD Kab.Pessel 2025*

Berdasarkan hasil penelitian sejarah tsunami di Indonesia antara tahun 1612 sampai dengan 2000 yang pernah dilakukan oleh Latief et al.(2000), Kemudian dilengkapi dengan kejadian tsunami 10 tahun terakhir didapatkan bahwa, tidak kurang dari 118 kejadian tsunami pernah terjadi di perairan Indonesia, 90% tsunami dibangkitkan oleh aktivitas tektonik, sedangkan 9% akibat vulkanik dan 1% oleh tanah longsor (*mitigasi Tsunami di Pulau Sumatra/Geomagz/Majalah Geologi Populer/esdm.go.id*).Data tersebut bila difokuskan kepada Wilayah Pulau Sumatera Khususnya Wilayah Pantai Barat Pulau Sumatera, maka potensi besar penyebab tsunami adalah akibat aktivitas tektonik. Tsunami Mentawai yang terjadi tanggal 25 Desember 2006, adalah contoh dari bencana tsunami mentawai yang terjadi Tanggal 25 Oktober 2010 adalah contoh dari bencana tsunami yang disebabkan oleh aktifitas tektonik.

Berdasarkan Kajian Dari Natawidjaya, 2011 (*Mitigasi Tsunami di Pulau Sumatra/Geommagz/Majalah Geologi Populer/Esm.go.id*), di Pulau Sumatera terdapat banyak laga jenis banyak yang ada di kabupaten pesisir selatan untuk itu diperlukan perencanaan kerja yang baik untuk pelayanan masyarakat baik pascabencana dengan Rehabilitasi dan Rekontruksi maupun Pencegahan Risiko Bencana, untuk itu diperlukan pendanaan baik pusat dan anggaran penadapatan belanja Daerah yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2023 dengan 2 Program 10 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan Anggaran Rp.5.784.482.170 Tahun 2022 dengan 2 Program 6 Kegiatan dengan Anggaran Rp.12.432.062.771 tahun 2021 dengan 2 Progrma dan 6 Kegiatan Sub Kegiatan 18 dengan Anggaran sebesar Rp.5.387.724.082,- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.4.731.400.000,- dengan pembiayaan APBD Murni, tahun 2019. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.3.949.5000,- dengan APBD murni. Dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp.3.057.338.428, Terdiri dari APBD,APBN Provinsi Sumatera dan APBD Murni tahun anggaran 2017 sebesar Rp.13.281.974.750,-(Terdiri Pemberian Bantuan Hibah Tahun 2016 dari BNPB Pusat sebesar Rp. 10 Milyar dan dengan APBD Murni Rp.3.281.974.750) dengan 11 Program dan 33 Kegiatan.Dengan Realisasi Persentase pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 71,26%. Dengan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan

Benakan Daerah pada Tahun 2017 dengan Tahun 2018 sebesar 57% berarti berkurangnya anggaran sebesar 43% dari Tahun 2017.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Isu Strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi focus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap pembangunan daerah pada masa mendatang. Jika pemerintah memprioritas antisipasi dan penanganan isu strategis, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih pasti. Sebaliknya kesalahan dalam mengelola isu strategis menyulitkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. perumusan isu strategis Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui indentifikasi berbagai isu global, nasional, regional tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai kondisi yang melanda dunia ini juga berdampak terhadap perekonomian local khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Turunya Perekonomian Sumatera Barat sebesar -1,60 persen dan perekonomian kabupaten pesisir selatan sebesar -1,11 persen menganbarkan dampak negative pandemic terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini menjadi isu yang penting untuk dimasukan dalam penyusunan perencanaan daerah kedepannya.

Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada beberapa Isu-Isu penting

#### Isu-Isu Strategis Daerah Sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Bidang	Isu Prioritas
6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum tercapainya Indeks resiko bencana</li><li>• Belum adanya dokumen strategi pengurangan resiko bencana</li></ul>

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Kerja Awal RKPD Tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 Rp. 6.457.456.260 Terdiri Dari 2 Program 9 Kegiatan. Perubahan Anggaran Tahun 2025 Rp. 6.361.028.010,- Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 Rp.8.021.874.012,- Rencana Kerja Tahun 2023 Rp.5.181.810.078 Terdiri dari 2 Program 10 Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2022 Rp.12.920.123.307 Terdiri dari 2 program 9 kegiatan Rancangan Kerja Awal RKPD Tahun

## *Rencana Kinerja (RENJA) BPBD Kab.Pessel 2025*

2021 berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021 sebesar Rp.12.432.062.771 terdiri 2 program 6 kegiatan.

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 berbasis masyarakat.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kegiatan
  - Perencanaan,Penganggaran,Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Rp.34.053.533)
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Rp.3.981.482.937)
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Rp.100.800.000)
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah (Rp.237.778.275)
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penjuang Urusan Pemerintah Daerah (Rp.49.630.250)
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Rp.70.000.000)
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Rp.276.452.459)
2. Program Penanggulangan Bencana
  - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Rp.297.079.160)
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Rp.206.833.286)
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Rp.1.009.223.206)
  - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Rp.88.694.904)

---

**BAB – III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

---

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, PROVINSI DAN NASIONAL**

---

Kabupaten Pesisir Selatan sangat rawan terhadap berbagai bencana, sehingga kondisi ini berpotensi menghambat atau mengganggu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena secara psikologis akan memberikan sentimen negatif terhadap investasi. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut perlu perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat terhadap upaya-upaya mitigasi dan manajemen kebencanaan. Upaya mitigasi dan manajemen bencana lebih berfokus pada penyiapan seluruh stakeholder untuk selalu siaga dan tanggap terhadap bencana disamping juga penguatan terhadap upaya-upaya tangap darurat serta pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana.

Isu pemanasan global seolah menyadarkan kita bahwa pembangunan yang kita lakukan hendaknya memperhatikan proses keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk keperluan pembangunan kita terus mengeksploitasi sumber daya alam dengan membabi buta dan abai akan keberlangsungan hidup anak cucu di masa yang akan datang. Karena itu, tak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam setiap aktifitas yang kita lakukan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terus dipelihara. Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup harus menjadi isu utama dalam pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan berbasis daya dukung dan daya tampung.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Implementasi Penanggulangan Bencana dituangkan dalam skala prioritas rencana Kerja Tahun 2025. Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Penanggulangan Bencana dititik beratkan pada tiga fokus prioritas yaitu :

- 1) Mengurangi risiko bencana dengan Meningkatkan kapasitas dalam menghadapi Bencana dan Penangan Bencana yang Profesional serta Pelayanan Informasi di Daerah Rawan Bencana dan membangun Sistem Dasar Penanggulangan Bencana secara terencana dan terpadu, dengan menerapkan kebijakan:

- 
- Membangun sistem Penanggulangan Bencana yang handal, dengan menerapkan kebijakan;
  - Menerbitkan aturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan
  - Mempercepat pembentukan aturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Membangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Sumber Daya Manusia yang memadai dan kompeten sesuai dengan standar;
  - Mempercepat pembangunan Badan Penanggulangan Badan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan metode yang terstandarisasi;
  - Menerbitkan prosedur internal untuk mobilisasi sumber daya Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penanggulangan Bencana;
  - Membangun jaringan kerja Penanggulangan Bencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya;
  - Membangun sistem peringatan dini bencana yang handal dan responsif bagi masyarakat;
  - Membangun kesiapsiagaan bencana secara partisipatif, dengan menerapkan kebijakan;
  - Membangun peningkatan pengetahuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
  - Membangun wilayah percontohan siaga bencana untuk mengembangkan ke Membangun kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana;
  - Memberdayakan ekonomi masyarakat di pesisir sebagai alternatif pengurangan kerentanan bencana;
  - Mempersiapkan infrastruktur penanggulangan bencana yang tangguh, dengan menerapkan kebijakan;
  - Menyusun skenario umum pengelolaan dan pengembangan wilayah berbasis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Melaksanakan Mitigasi Struktural pada daerah rentan;
  - Menerapkan analisis risiko bencana pada rencana pembangunan;
  - Mempersiapkan daerah untuk memasuki masa pemulihan bencana.

2) Memobilisasi kemampuan masyarakat dan lembaga pada masa krisis dengan tujuan utama meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana, dengan menerapkan kebijakan:

- Mengaktifkan petugas tanggap darurat dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - Mengerahkan sumber daya dalam upaya penyelamatan pengungsi dan pemulihan fasilitas kritis;
  - Menjamin distribusi logistik yang tepat sasaran;
-

- Mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana susulan dan/atau epidemi penyakit.

3) Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis dengan tujuan utama melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana, dengan menerapkan kebijakan:

- Memulihkan secara permanen kebutuhan primer penduduk korban bencana;
- Memulihkan aktivitas perekonomian penduduk;
- Memulihkan fasilitas dan utilitas pelayanan umum;
- Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

### 3.2 . TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN
Berkurangnya Risiko Bencana..	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana..
	Mewujudkan Penanganan Bencana Yang Profesional. .
	Pemulihan Daerah Terdampak Bencana.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Program dan kegiatan Tahun 2025 a.l;

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- 
- a. Sub Kegiatan Penata Usahaan Milik Daerah Pad SKPD
  - b. Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - c. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik .
7. Kegiatan Pemeliharaan Baran Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Kantor

## **II. Program Penanggulangan Bencana**

8. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
-

- 
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
9. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
  - b. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Sub Kegiatan Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - e. Sub Kegiatan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
  - f. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - g. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  - h. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijen
  - i. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - j. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
  - k. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
10. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- a. Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
  - b. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - e. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  - f. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
-

**11. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

- a. Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
  - b. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - d. Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  - f. Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
-

---

**BAB – IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 telah mengacu kepada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RKPD BPBD yang terdiri dari dua Program yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
  2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
  3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
  4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- A. Sumber dana / Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/ Kegiatan (terlampir dengan Tabel 4.1 Aplikasi SIPD dibawah ini:**

## BAB - V PENUTUP

Perubahan Renja BPBD Tahun 2025 disusun dan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah, berdasarkan RKPD 2025 dan Rancangan RPJMD 2021 - 2026. Renja BPBD Tahun 2025 akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra BPBD 2021 - 2026 yang akan ditetapkan setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya Perubahan Renja BPBD 2025 agar menjadi memberikan gambaran umum tentang kondisi BPBD dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang di tetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025

Apabila terjadi perubahan asumsi/prediksi, kebijakan dan peraturan yang lebih tinggi dan keadaan yang luar biasa maka Perubahan Renja BPBD Tahun 2025 ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan tatacara dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

Painan, Maret 2025

Kepala Pelaksana



**YUSKARDI, SST, MT**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700123 199903 1 004

Tabel TC.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Tipe	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Renditas Awal RPJMD Tahun 2025	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Renditas Kinerja awal tahun periode Rencana Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1.3	BKPD		100	100	4.414.864.135	100	12.068.494.407	100	4.356.828.054	100	5.818.275.394	100	6.391.028.010	100	5.018.047.429	100	58.027.548.429	BKPD	
Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertanam dan Dinamis dan Pemah Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Warga Dalam Berbagi Tanggung Jawab dan Mandiri	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERTAHAN DAERAH KABUPATENINDOTA	PERSENTASE KETERCAPIAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH (%)	100	100	4.183.558.290	100	3.779.891.794	100	3.885.038.291	100	4.180.907.889	100	4.790.197.454	100	4.847.047.429	100	25.428.017.907	BKPD	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	34.344.882	100	34.344.882	100	39.738.613	100	-	100	34.053.533	100	37.458.886	100	179.940.908	BKPD	Painan
		1.05.01.2.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52	5	34.344.882	9	34.344.882	13	39.738.613	7	-	10	34.053.533	10	37.458.886	52	179.940.908	BKPD	Painan
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Unsur Perangkat	100	100	3.483.423.047	100	3.483.423.047	100	3.430.828.873	100	3.941.482.827	100	3.941.482.827	100	4.191.828.084	100	22.552.477.427	BKPD	Painan
		1.05.01.2.02.01	Pembacaan Gaji dan Tanggapan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tanggapan	125	12	3.180.690.430	23	3.180.690.430	23	3.167.482.170	23	3.756.102.937	23	3.756.102.937	24	3.943.908.084	128	20.984.977.029	BKPD	Painan
		1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80	12	302.732.847	10	302.732.847	5	263.357.505	5	225.340.000	5	225.340.000	10	247.818.000	47	1.507.500.799	BKPD	Painan
		1.05.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Daerah (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	190.800.000	100	110.880.000	58	211.680.000	BKPD	Painan
		1.05.01.2.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Keengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut keengkapannya yang disediakan	56	56	-	-	-	-	-	-	-	10	100.800.000	10	110.880.000	76	211.680.000	BKPD	Kab. Pesisir
		1.05.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat	100	100	205.884.280	100	205.884.280	100	227.771.879	100	253.007.280	100	237.778.273	100	#REF!	100	#REF!	BKPD	Painan
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	3	2.496.780	-	2.496.780	-	2.451.879	-	2.356.260	-	4.225.057	-	4.647.563	3	18.074.319	BKPD	Kab. Pesisir
		1.05.01.2.06.00.2	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	4.428.941	-	-	-	-	-	-
		1.05.01.2.06.08	Facilitas Kurungan Tams	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tams	875	12	2.565.000	-	2.565.000	-	1.925.000	-	1.925.000	-	4.100.000	-	20.000.000	12	33.080.000	BKPD	Painan
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35.007.462	-	-	-	-	-	-
		1.05.01.2.06.002	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29.999.885	-	-	-	-	-	-
		1.05.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	240	250	200.622.500	-	200.622.500	-	223.395.000	-	248.726.000	-	133.055.000	-	153.013.250	#REF!	1.159.434.250	BKPD	Kab. Pesisir
		1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Ansp Dinas pada SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan Ansp Dinas pada SKPD	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	26.981.000	-	-	-	-	-	-
		1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah	Persentase Keterlaksanaan barang milik daerah	100	-	-	100	12.160.720	100	-	100	-	100	48.830.250	100	-	100	61.790.870	BKPD	Painan
		1.05.01.01.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5	-	-	12.160.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.160.720	BKPD	Painan
		1.05.01.2.07.004	Pengadaan Perlatan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	49.630.250	-	-	-	-	-	-
		1.05.01.01.06	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Realisasi Tahunan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kelembahan Dana/ Paga Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kelembahan Dana/ Paga Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RPD				6.437.456.260	RPD				6.351.028.010	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		PERSENTASE KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (%)	100	4.700.778.704	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		PERSENTASE KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (%)	100	4.750.197.454	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	44.830.033	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	34.063.533	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Painan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	44.830.033	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Painan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	34.063.533	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	3.961.422.937	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	3.981.482.937	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Painan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	201	3.756.102.937	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Painan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	201	3.756.102.937	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Painan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	205.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Painan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	225.380.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Painan	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	856.815.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	577.420.590	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Painan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56	100.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Painan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56	100.800.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	513.073.275	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	237.778.275	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Painan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	4.225.057	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Painan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	4.225.057	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Painan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	47	4.409.841	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Painan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	47	4.409.841	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Painan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	35.007.492	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Painan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	35.007.492	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Painan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	29.999.885	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Painan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	29.999.885	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Painan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	4.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Painan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Painan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	237.140.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Painan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	4.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Painan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	32.991.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Painan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	133.055.000	
	Peratuasahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Painan	Terlaksananya Peratuasahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	32.991.000	Peratuasahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Painan	Terlaksananya Peratuasahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	26.981.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan Pemerintah Daerah (%)	100	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan Pemerintah Daerah (%)	100	49.630.250	

No	Rencana Awal RKPD					Basis Analisis Keberhasilan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Page Indikator (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Page Indikator (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	-	
	Pengadaan Mebel	Painan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	134	-	Pengadaan Mebel	Painan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	134	-	
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	-	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	49.630.250	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penanggulangan Bencana)	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penanggulangan Bencana)	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	12	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	12	-	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Berhondol Baik (%)</b>	<b>100</b>	<b>256.902.459</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Berhondol Baik (%)</b>	<b>100</b>	<b>276.452.459</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Painan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	39.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Painan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	39.190.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	191	217.712.459	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	191	217.712.459	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Painan	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	60	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Painan	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	60	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	19.550.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Painan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Painan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	-	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		<b>Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap</b>	<b>49,86</b>	<b>1.756.677.556</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		<b>Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap</b>	<b>49,86</b>	<b>1.600.330.556</b>	
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota</b>		<b>Persentase Sosialisasi KIE Rawan Bencana</b>	<b>13</b>	<b>300.072.160</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota</b>		<b>Persentase Sosialisasi KIE Rawan Bencana</b>	<b>13</b>	<b>297.079.160</b>	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	10	250.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	10	250.000.000	

No	Rencana Aksi RKPD					Rencana Aksi Kabupaten					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tipe Kegiatan	Kebijakan Dasar/ Page Induk (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tipe Kegiatan	Kebijakan Dasar/ Page Induk (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rencana Bencana Kabupaten/Kota (Projeksi Bencana) (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Paluan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rencana Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara tatap Muka Kepada Pemilik yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3	50.072.160	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rencana Bencana Kabupaten/Kota (Projeksi Bencana) (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Paluan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rencana Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara tatap Muka Kepada Pemilik yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3	47.079.260	
	Pelaksanaan Pengujian dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase warga negara yang telah mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan	3	275.623.256	Pelaksanaan Pengujian dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase warga negara yang telah mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan	5	206.833.285	
	Penyusunan Rencana dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Jumlah Dokumen RPB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	2	100.000.000	Penyusunan Rencana dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Jumlah Dokumen RPB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	2	100.000.000	
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Paluan	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	2		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Paluan	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	2		
	Pelatihan Pengarah dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	2	72.157.741	Pelatihan Pengarah dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	2	58.994.722	
	Pengalihan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Tersedianya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	20		Pengalihan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Tersedianya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	20		
	Pengembangan Kapasitas Tim Respon Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Jumlah Personil TRC yang Diberibagikan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal			Pengembangan Kapasitas Tim Respon Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Jumlah Personil TRC yang Diberibagikan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal			
	Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Kelembagaan Bencana	Paluan	Jumlah Dokumen Rencana RKPB yang Dilgalisasi	1		Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Kelembagaan Bencana	Paluan	Jumlah Dokumen Rencana RKPB yang Dilgalisasi	1		
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Paluan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	10	25.739.400	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Paluan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	10	17.613.400	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Paluan	Jumlah laporan yang merunut kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Paluan	Jumlah laporan yang merunut kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2		
	Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pendalops) dengan Mekanisme Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2	60.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pendalops) dengan Mekanisme Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2		
	Penyediaan peralatan perlengkapan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Jumlah Peralatan perlengkapan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggal			Penyediaan peralatan perlengkapan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Paluan	Jumlah Peralatan perlengkapan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggal	1	50.828.265	
	Pengendalian Perakatan Penyelenggaraan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Paluan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengalihan Kelembagaan Pasca Bencana (JITU PASPA) Bencana Dibebaskan Dasa, Kabupaten/Besara	2	67.723.165	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Atau (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Paluan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengalihan Kelembagaan Pasca Bencana (JITU PASPA) Bencana Dibebaskan Dasa, Kabupaten/Besara	2		

Tabel TC. 31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
KABUPATEN PESIR SELATAN

1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Basasan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Catatan Penting
2	3	4	5	12	
	RFED				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ NOTA		PERSERTASE KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (%)	100	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	Painan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Painan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	Painan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	Painan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Painan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	201	Painan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Painan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	Painan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	Painan
	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Painan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56	Painan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	Painan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Painan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	Kab. Pessel
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Painan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	47	Painan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Painan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Kab. Pessel
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Painan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	Kab. Pessel
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Painan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	Painan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Painan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	Painan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Painan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	Kab. Pessel
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Painan	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	Painan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan Pemerintah Daerah (%)	100	Painan

1	2	3	4	5	22	12
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	Painan		
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Painan		
Pengadaan Mebel	Painan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	135	Painan		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>Painan</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik( Badan Penanggulangan Bencana )	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Kab. Pessel		
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor,	12	Painan		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik (%)</b>	<b>100</b>	<b>Painan</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Painan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Painan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	191	Painan		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Painan	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	60	Painan		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	Painan		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Painan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	Painan		
<b>II PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		<b>Presentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap</b>	<b>100,00</b>	<b>Kab. Pessel</b>		
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota</b>		<b>Persentase Sosialisasi KIE Rawan Bencana</b>	<b>100</b>			
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	10			
Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana ) (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH )	Painan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana 0 Secara tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3			

1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	22	Catatan Penting
1	2	3	4	5	22	12
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>Peresentase warga negara yang telah mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan</b>	100		
	Penyusunan Rencana dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen RPB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	2		
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Painan	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	2		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	2		
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	20		
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal	-		
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Painan	Jumlah Dokumen Rencana RKPBB yang Dilegalisasi	1		
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Painan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	10		
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Painan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2		
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Painan	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA ) Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca	2		
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>Persentase Korban Bencana Yang Ditangani</b>	100		
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Painan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	10		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2		
	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Painan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	2		

1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	22	12
	2	3	4	5		
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Painan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2		
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota ( BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH )	Painan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2		
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		<b>Persentase Pemilihan dan Peningkatan kapasitas rehabilitasi pasca bencana</b>	100		
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1		
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1		
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Painan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1		
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Painan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1		
	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Painan	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota	200		

**Tabel TC. 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program (Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) x100%	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
URUSAN PEMERINTAH											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERIBAH UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	1.05.1.701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE KETERCAPIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (%)	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1	1.05.1.081.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1	1.05.1.081.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52	-	5,00	5,00	100,00	4,00	9,00	17,31
2	1.05.1.081.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
2	1.05.1.081.2.02.001	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	-	60,00	60,00	100,00	60,00	120,00	96,00
2	1.05.1.081.2.02.002	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (BADAN PEYANGGILAN/ANGKAT)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90	-	60,00	60,00	100,00	60,00	120,00	133,33
3	1.05.1.081.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
	1.05.1.081.2.06.001	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor yang Dibekalkan	20	-	60,00	60,00	100,00	201,00	261,00	1.305,00

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (contesmal/Kegiatan Kontes)	Target Renstra Daerah pada Tahun 2025 (AKBR Periode Renstra Persegi Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Rekrutan Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Rencana Persegi Daerah tahun 2025)	Pembacaan Realisasi Capaian Target Renstra Persegi Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renstra Daerah 2025	Realisasi Renstra Daerah 2025	Tingkat Realisasi (%)		11 = (6+8+10)	12 = (11/5)	
1	1.05.1.081.2.06.002	Pengadaan Peralatan dan Pembelian Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pembelian Kantor yang Disediakan	5	-	-	-	7,00	7,00	100,00	7,00	140,00
6	1.05.1.081.2.06.003	Pengadaan Bahan Logistik Kantor (BAGAN RENANGZALAMAN BENCAVA DIERUK)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	-	-	-	30,00	30,00	100,00	31,00	620,00
7	1.05.1.081.2.06.004	Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	5	-	-	-	7,00	7,00	100,00	8,00	160,00
	1.05.1.081.2.06.005	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peralatan Peningkat- Umbungan	Tersedianya bahan bacaan dan peralatan pendukung- undangan	1	-	-	-	-	1,00	100,00	1,00	100,00
8	1.05.1.081.2.06.006	Pengembangan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	-	-	-	3,00	3,00	100,00	6,00	2,50
9	1.05.1.081.2.06.007	Penyusunan Ayoq Dharma pad SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan Ayoq Dharma pada SKPD	1	-	-	-	12,00	12,00	100,00	24,00	2.400,00
9	1.05.1.081.2.06.008	Fasilitasi Kurangan Ternu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kurangan Ternu	875	-	-	-	12,00	12,00	100,00	12,00	2,74
4	3.27.0.001.2.08.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	200,00	20.000,00
12	3.27.0.001.2.08.04.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	5,00	5,00	100,00	5,00	500,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	12,00	-	12,00	1.200,00
5	3.27.0.001.2.09.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Peningkat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	200,00	20.000,00

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangko Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangko Daerah)	Realisasi Kinerja Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Rencana Perangko Daerah tahun 2026)	Pertemuan Realisasi Capaian Target Renstra Perangko Daerah s/d tahun berjalan	
						7	8	9 = (8/7) *100%		10	11 = (6-8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) *100%	10	11 = (6-8+10)	12 = (11/5)
13	3.27.0.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Penyngg Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketertarikan jasa Penyngg urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	-	5,00	5,00	100,00	192,00	197,00	197,00
14	3.27.0.001.2.09.06	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik (BAND PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	-	58,00	58,00	100,00	54,00	112,00	2.240,00
15	3.27.0.001.2.09.09	Pembelajaran Asat Tetap Lainnya	Jumlah Asat Tetap Lainnya Yang Dipekerti	5	-	3,00	3,00	100,00	4,00	7,00	140,00
II	3.27.0.002.2	Pembinaan (pembuktian) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	50,75	50,75	100,00	48,88	99,63	9.962,84
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Persentase Korban Bencana Yang Diperbaiki Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100	-	-	-	-	4,50	4,50	4,50
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dipekerti	5	-	-	-	-	792,00	792,00	15.840,00
16	3.27.0.002.2.01.02	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rambu Bencana Kabupaten/Kota (Pangres) Penyusunan Rencana dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rambu Bencana Kabupaten/Kota (Pur Jawa Bencana 0 Jumlah Dokumen FPG Sempai Dengan Dinyatakan Selesai) legal	125010	-	15,00	15,00	100,00	15,00	30,00	0,02
		Penyusunan Rencana Kertelari	Jumlah Dokumen Rencana Kertelari untuk Setiap Bencana Nuklir di Daerah	5	-	-	-	-	5.001,00	5.001,00	100.020,00

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelurahan Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Pertemuan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) x100%	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		Pelebaran Perencanaan dan Mngaji Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang kul pebliban	55	-	3.896,00	3.896,00	100,00	85.906,00	99.902,00	163.276,36
		Pengabdian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terseleksiannya kegiatan untuk menguji alar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	5	-	49,00	49,00	100,00	-	49,00	980,00
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dibebaskan Kapasitas Tulis dan Manajemennya Tetris dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Perencanaan Awal Darurat Bencana	5	-	5.418,00	5.418,00	100,00	10.500,00	15.918,00	318.360,00
17	3.27.0.002.2.01.	Penyusunan Rencana Pengembangan Kedarifan Bencana Glati Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	55	-	20,00	20,00	100,00	-	20,00	36,36
		Pengujian Kapasitas Kawasan untuk Peringatan dan Kesiapsiagaan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang merallih mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5	-	3,00	3,00	100,00	6,00	9,00	180,00
18	3.27.0.002.2.02.	Pengendalian Operasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan bencana pusat pengendalian operasi (pusdatops) dengan Maksud dan Pelsyaran yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5	-	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	100.000,00
		Pelebaran Keluarga Tanggap Bencana Alam (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Dolajumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melaki Pengujian Kebutuhan Pasca Bencana (JTU PASNA.) Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca	60	-	1.500,00	1.500,00	100,00	-	1.500,00	2.500,00

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) x 100%	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	55	-	3.896,00	3.896,00	100,00	85.906,00	89.802,00	163.276,36
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	5	-	49,00	49,00	100,00	-	49,00	980,00
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	5	-	5.418,00	5.418,00	100,00	10.500,00	15.918,00	318.360,00
17	3.27.0.002.2.01.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana RGPB yang Dilegalisasi	55	-	20,00	20,00	100,00	-	20,00	36,36
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	157	-	307,50	307,50	100,00	-	307,50	195,86
		Pengujian Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5	-	3,00	3,00	100,00	6,00	9,00	180,00
18	3.27.0.002.2.02.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maksud Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5	-	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	100.000,00
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA ) Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca	60	-	1.500,00	1.500,00	100,00	-	1.500,00	2.500,00

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) x100%	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00
19	3.27.0.002.2.03.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	60	-	49,00	49,00	100,00	-	49,00	81,67
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	60	-	5.250,00	5.250,00	100,00	-	5.250,00	8.750,00
		Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	154020	-	3.896,00	3.896,00	100,00	-	3.896,00	2,53
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	60	-	3.720,00	3.720,00	100,00	-	3.720,00	6.200,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota ( BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH )	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	154020	-	-	-	-	3,00	3,00	0,00
20	3.27.0.002.2.05.05.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	PersentasePemilihan dan Peningkatan kapasitas rehabilitasi pasca bencana	100	-	148,00	148,00	100,00	150,00	298,00	298,00
21	3.27.0.002.2.05.06.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2	-	-	-	-	5,00	5,00	250,00
III	3.27.0.003.2.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	6	-	2,39	2,39	100,00	2,31	4,70	78,33

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) x100%	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	5	-	8,16	8,16	100,00	4,50	12,66	253,20
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penanggulangan Bencana (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Hasil Penanggulangan Bencana	5	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program</b>										37,45	1.270,36
<b>Peringkat Kinerja dari Seluruh Program</b>										SR	ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					: Ketersediaan peralatan dan perlengkapan dalam menjalankan tugas, ketersediaan biaya operasional						
Faktor penghambat pencapaian kinerja					: Pergeseran anggaran						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					: Percepatan pelaksanaan kegiatan agar target tercapai						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/Program Tahun Berjalan						

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rencana Awal RKPD Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Biaya Komsumsi Bahan Baku	
			Lebak	Target Capaian Fisik (%)	Kebijakan Dana/ Page Indikator (Rp.)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RPBD				5.829.331.443			100	4.351.028.010
1	PROGRAM PERUKAAN URBAN PEMERTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSEKUTUAN KETERKAPAN PERSEKUTUAN URBAN PEMERTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	4.091.968.948			100	4.750.197.454
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)		100	44.583.865			100	34.051.533,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Puainan	4	44.583.865	APBD		4	34.051.533,00
	Administrasi Keuangan Daerah	Perentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		100	3.409.566.953			100	3.981.482.937,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Buldan)	Puainan	201	3.161.486.953	APBD		201	3.756.102.937,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Puainan	1	248.080.000	APBD		1	275.380.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	274.199.983			100	237.778.275,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Perawatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perawatan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Puainan	7	2.356.260	APBD		7	4.225.057,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Puainan	47	4.452.021	APBD		47	4.409.841,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Puainan	1	29.116.467	APBD		1	35.007.492,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengabdian yang Disediakan (Paket)	Puainan	1	26.740.235	APBD		1	29.999.885,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Puainan	3	-	APBD		-	-
	Fasilitas Kurjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurjungan Tamu (Laporan)	Puainan	12	1.925.000	APBD		12	4.100.000,00
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kerjasama SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kerjasama SKPD (Laporan)	Puainan	250	209.610.000	APBD		250	133.055.000,00
	Perantaraan Asap Dinas pada SKPD	Tertindakannya Perantaraan Asap Dinas pada SKPD	Puainan			APBD		10	26.981.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan Pemerintahan Daerah (%)		100	-			100	49.630.150,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Puainan	-	-	APBD		-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Puainan			APBD			49.630.250,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Puainan	-	-	APBD		-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	62.400.000			100	70.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penyelenggara Bebanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Puainan	12	62.400.000	APBD		12	70.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor,	Puainan	12	-	APBD		12	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Barang Milik Daerah Yang Berkehoondial Baik (%)		100	301.218.147			100	276.452.459,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jalatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya (Unit)	Puainan	1	39.190.000	APBD		1	39.190.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorannya (Unit)	Puainan	191	248.028.147	APBD		191	217.712.459,00
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	Puainan	60	-	APBD		60	-

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Nilai Bencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rehabilitasi Dana/ Paga Indikator (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rehabilitasi Dana/ Paga Indikator (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki (Unit)	Paluan	4	13.400.000	APBD		4	19.550.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirubahabihkan (Unit)	Paluan	2	-	APBD		2	
<b>II</b>	<b>PENDIRAN PERANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>Preventasi Korban Bencana Yang Ditevakuasi Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Langsung</b>		<b>100</b>	<b>1.737.361.498</b>			<b>100</b>	<b>1.600.810.556,00</b>
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Sosialisasi KIE Rawan Bencana		100	98.071.160			100	297.079.160,00
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Kondisi, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	Paluan	10	-	APBD		10	250.000.000,00
	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Perjenis Bencana) (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (DAERAH))	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Paluan	3	98.071.150	APBD		3	87.079.160,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang telah mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan		100	179.100.440			100	206.831.286,00
	Persediaan Peralatan dan Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/ Kota			56.674.745				50.828.165,00
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Paluan	2	-	APBD		2	
	Pelatihan Penegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Paluan	2	122.425.695	APBD		2	38.394.721,00
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota	Paluan	20	-	APBD		20	
	Pengembangan Kapasitas Tim Respon Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal	Paluan	-	-	APBD		-	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana RK/KB yang Dilegalisasi	Paluan	1	-	APBD		1	100.000.000,00
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Paluan	10	-	APBD		10	17.610.400,00
	Pengatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Paluan	2	-	APBD			
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Muktamut Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Paluan	2	-	APBD			
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (BADAN PERANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengalihan Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASBA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Paluan	2	-	APBD			
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani		100	1.288.838.201			100	1.008.221.206,00

Kawasan Kerja RUPD		Anggaran Tahun 2024					Perencanaan Rincian Anggaran Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rogion Cepot Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Evidensi Rogion Cepot Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Pairan	10	-	APBD		10	
	Rogion Cepot Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK/POB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaki-Cerat	Pairan	2	-	APBD		2	
	Penyusunan Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dierkasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pairan	2	1.218.538.091	APBD		2	951.088.235,00
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pairan	2	-	APBD		2	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pairan	2	67.300.110	APBD		2	57.134.971,00
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase/Pemilihan dan Peningkatan kapasitas rehabilitasi pasca bencana</b>		<b>100</b>	<b>174.352.704</b>			<b>100</b>	<b>88.694.904,00</b>
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Perundang Perundang Penanggulangan Bencana di Daerah	Pairan	1	-	APBD		1	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Pairan	1	-	APBD		1	
	Suabagian Teknis Pascabencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Penanggulangan Bencana	Pairan	1	-	APBD		1	36.720.207,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Bimbas Penyelenggaraan Hasil Penanggulangan Bencana			72.927.007				
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Pairan	1	-	APBD		1	
	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan RSP melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota	Pairan	200	101.425.697	APBD		200	51.974.697,00
					<b>8.829.331.443</b>				<b>4.351.028.010,00</b>